

REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA TAMANSARI KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR

Moh. Idil Ghufron¹, Indana Fitriyatul Arifin², Siti Ibra Sonia³

^{1,2,3} Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid
Jl. KH. Zaini Mun'im, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67291, Indonesia

✉ Corresponding Author:
Nama Penulis: Moh. Idil Ghufron
E-mail: aidil.piero7@gmail.com

Abstract

The Village Fund is prioritized to finance the implementation of local village-scale programs and activities in the field of village development such as housing facilities and infrastructure, food security, health, education and to finance the field of community empowerment, namely programs aimed at increasing the capacity of rural communities in entrepreneurial development, increasing income, and expansion of the economic scale of individual citizens or community groups. After the village fund, the community began to feel a positive impact as seen from the collaboration between the government and the community in increasing the development of village facilities and infrastructure such as community economic activities aimed at improving the economy of the Tamansari village community. The research uses an ethnographic approach, because initially this method was mostly used for research in the field of cultural anthropology. The type of research used by researchers is qualitative research. The economic development of the Tamansari Village community before the existence of village funds has not been able to be felt by the community as a whole.

Keywords: *The Village Fund; Economic; Community*

Abstrak

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat

dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti kegiatan perekonomian masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tamansari. Penelitian ini menggunakan pendekatan Etnographi, Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif. Pengembangan perekonomian masyarakat Desa Tamansari sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tamansari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setelah adanya dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan.

Kata kunci: Dana Desa; Perekonomian; Masyarakat

PENDAHULUAN

Secara Yuridis keberadaan desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat setempat yang memiliki kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat adalah desa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi adalah sistem pemerintahan setelah masa orde baru yang sampai saat ini berjalan, dan sistem pemerintahan yang dulu sebelum masa orde baru masih menggunakan sentralisasi. Pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara yang telah di pusatkan kepadanya di sebut sistem sentralisasi. Pada masa berjalannya sistem sentralisasi tersebut di nilai kurang efektif, di karenakan kurang meratanya pembangunan di seluruh indonesia. Maka pemerintah pusat meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dan menanggulangi pembangunan yang tidak merata denagn di adakannya sistem Desentralisasi. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Republik indonesia memiliki lingkup terkecil dalam pemerintahan yakni tingkat pemerintahan desa. Oleh karena itu peranan desa dalam pembangunan 1 cukup besar. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat termasuk tujuan dari pemerintah pusat, di situlah fungsi pemerintahan desa jika berjalan secara maksimal. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Aturan dalam kehidupan desa dan kebebasan untuk membuat regulasi sebelum di atur oleh pemerintah daerah menjadikan pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat

membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat di pertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah daerah mewajibkan pemerintah desa untuk dapat mengatur dan mengelola urusannya sendiri. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Agara program-program yang telah di agendakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kinerja dari pemerintah desa menjadi salah satu objek pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kurangnya pemerataan pembangunan Infrastruktur menjadi acuan terpenting dalam program tersebut. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang bersumber dari APBN dan di transferkan melalui APB, juga di peruntukkan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Pemerintah pusat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pemerintah desa. Baru-baru ini muncul permasalahan tentang pengelolaan dana desa, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat pemerintah desa di harapkan dapat mengelola

sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, dan efektif.

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Dengan demikian, masyarakat banyak yang menghawatirkan pemerintah desa dalam mengelolah dana desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah di programkan dalam pelaksanaan Dana Desa pemerintah pusat mengharap dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta yang mempunyai wewenang dalam membina pengelolaan Dana Desa ialah pemerintah daerah. APBN memperkirakan dana desa yang di berikan berkisar 1 miliar rupiah setiap tahunnya, kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya mengakibatkan dana sebesar itu menjadi tidak efisien. Kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa melahirkan pro dan kontra, untuk menyelenggarakan kewenangannya sendiri kewenangan yang diperoleh desa yang ada di undang-undang nomor 6 tahun 2014, Peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah maupun pun ilmiah.

Transparansi dan akuntabilitas dana desa dalam implementasi pengelolaannya perlu kiranya peneliti menganalisis hal tersebut. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Tamansari Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo yang berprestasi di tingkat kabupaten maupun nasional. Desa tersebut pun menjadi pemenang sebagai salah satu desa terbaik kategori Kecamatan di Indonesia pada tahun 2014 dalam hal kebersihan desa dan keindahan.

Namun Desa Tamansari ini memiliki banyak kekurangan yang diantaranya yakni pemberdayaan masyarakat, Pembangunan desa, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Namun peneliti di sini hanya bertitik fokus kepada pemberdayaan masyarakat yang sampai saat ini pihak desa tidak begitu memikirkan tentang perekonomian masyarakat desa, masih banyak masyarakat di desa Tamansari yang perekonomiannya di

bawah rata-rata namun jarang untuk mendapatkan bantuan, entah itu berupa pakaian, tempat tinggal, maupun makanan sehari-hari, namun ada beberapa masyarakat juga yang sudah mendapatkan bantuan berupa tempat tinggal yang di bangun dengan menggunakan dana desa, ada sekitar 25 rumah masyarakat yang sudah di bangun.

Agar dana desa terus dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di desa Tamansari, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan tersebut dengan judul: Realisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnographi. Sebagaimana pendekatan etnographi ini dalam pengertian secara umum merupakan suatu pengamatan dan sebagian dari penelitian lapangan. Tujuan etnographi ini adalah mengalami bersama pengertian bahwa pemeran serta kebudayaan memperhitungkan dan menggambarkan pengertian baru untuk pembaca dan orang luar. Pendekatan etnographi secara umum adalah pengamatan berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan. Jadi, etnographi ialah salah satu penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini didasarkan pada studi kasus yang akan diteliti yaitu Realisasi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Tamandari.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif. Sebagaimana pengertian penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memanfaatkan wawancara secara terbuka untuk mengkaji dan mempelajari sikap atau pandangan dari pelaku secara individu, kelompok sosial, ataupun masyarakat tentang apa yang dialami oleh objek untuk menghasilkan data yang bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang perlu diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi suatu obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dengan demikian alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan etnographi agar peneliti lebih mudah memahami secara detail melalui pendekatan langsung dengan obyek yang diamati.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data dalam penelitian ini ialah:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya secara langsung dari tempat penelitian. Dalam mendapatkan data ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, antara lain yakni perangkat desa Tamansari bagian keuangan. Dalam keberlangsungan ketika wawan cara dengan bagian keuangan yang peneliti tanyakan pertama kali ialah tentang bagaimana desa tersebut mengelola Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, dan jawaban yang paling singkat dari bagian keuangan tersebut ialah dengan cara memberikan bantuan berupa sandang, pangan, dan papan.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, data sekunder biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data tersebut yaitu berupa beberapa buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data ini merupakan data pelengkap yang akan dihubungkan dengan data primer. Adapun data sekunder yang dipakai sebagai bahan rujukan ialah dengan cara mempelajari berbagai teori dalam buku yang membahas tentang *e-commerce (bisnis online)* dan pendapatan usaha.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

Observasi

Mengumpulkan data dengan cara observasi ialah dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau masalah utama dalam inti pada obyek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi pada balai desa Tamansari.

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu *pewawancara* (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara ialah mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti sebagai pewawancara dan yang terwawancara kepala desa dan warga desa tamansari.

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, atau yang lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dalam melakukan display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Verifikasi dan penegasan kesimpulan (*Verification and Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pengecekan keabsahan data dalam peneliti ini meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.140 jiwa. Dengan rincian laki-laki berjumlah 2.015 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan

berjumlah 2.055 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Tamansari

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK
1.	Alang-alang	6	6	247
2.	Nangkaan	6	6	226
3.	Karanganyar	6	6	240
4.	Lanas	9	9	334
5.	Krajan	6	6	279
	JUMLAH	33	33	1.326

Sumber: Dok Kantor Desa Tamansari, 2020

Tabel 2. Mata Pencaharian Pokok Warga Desa Tamansari

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	% dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	810	14 %
2.	Buruh tani	555	10 %
3.	PNS	376	7 %
4.	Karyawan swasta	421	7 %
5.	Pedagang	118	2 %
6.	Wirausaha	238	4 %
7.	Lain-lain/tidak tetap	748	13 %

Sumber: Dok Kantor Desa Tamansari, 2020

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Tamansari jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 66%. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 14 % dari total jumlah penduduk. 13% mempunyai pekerjaan yang tidak tetap alias buruh harian lepas. Jumlah dari buruh tani adalah sebanyak 10 %. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, karyawan swasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Tamansari tidak memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, kondisi air yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Tamansari secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

Tabel 3. Kondisi Perekonomian Masyarakat

No	Kategori Penduduk Miskin	Jumlah (KK)
1	Agak Miskin	858
2	Miskin	259
3	Sangat Miskin	163

Sumber: Dok Kantor Desa Tamansari, 2020

Perekonomian Masyarakat Desa Tamansari Sebelum dan Sesudah Adanya Program Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan perekonomian masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Tamansari yaitu Bapak Sulaiman menyatakan bahwa:

“Sebenarnya peningkatan ekonomi masyarakat sebelum adanya dana desa itu ada cuma terbatas, terbatas dalam artian seperti kegiatannya atau pendanaannya masih bersifat swadaya, dari dulu ada cuma terbatas. Makanya peningkatan ekonomi masyarakat dalam bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup terdengar atau terlihat di masyarakat, karena itu tadi masih terbatas. Selain itu juga, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal, seperti karangtaruna salah satunya, perekonomian pada para pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal”

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Perekonomian masyarakat di Desa Tamansari selama ini belumlah berjalan secara maksimal, terutama sebelum adanya kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah. Tidak hanya itu, proses pembangunan infrastruktur di Desa Tamansari pun kerap kali berbenturan dengan terbatasnya dana yang tersedia. Dalam wawancara dengan Bapak Budi, kaur pembangunan, beliau mengatakan hal yang sama bahwa perekonomian yang dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintahan desa hanya melakukan perekonomian yang minim dengan dana seadanya.

“Keadaan ekonomi masyarakat Desa Tamansari secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa ini. Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur untuk pada tahun ini. Makanya keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda

dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan belum ada perbaikan. Kasarnya keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa ini cukup jeleklah, seperti jalan di kampung-kampung yang rusak, jembatan juga gitu sama. Selain itu juga, ketika kami pihak pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalau sebelum adanya dana desa”

Perekonomian masyarakat Desa Tamansari sebelum adanya dana desa memang terlihat cukup kurang, atau sekalipun ada belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, keadaan infrastrukturpun masih belum baik, seperti jalan, jembatan dan yang lainnya yang berada di perkampungan.

Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sulaiman, sebelum adanya program Dana Desa (DD) satu milyar perdesa, pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Tamansari hanya memperoleh dana sebesar Rp64.162.324 yang dana tersebut bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa) dan Bantuan Keuangan (BK). Melalui Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Tamansari mengalokasikan anggaran dana ini untuk sektor pembangunan yang jumlahnya yakni sebesar Rp154.965.000. Dalam wawancara dengan Bapak Sulaiman dikatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraan, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah Pengadaan BUMDES yang berupa Warung Desa. Bumdes menjual kebutuhan pertanian, pengadaan KWT (kelompok wanita tani yang berasal dari program PKK), dalam kegiatan kesehatan yaitu jambanisasi dan pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD), perekonomian LINMAS”

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui program dana desa berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun perekonomian masyarakat. Aktifitas pembangunan ataupun perekonomian masyarakat ini diharapkan dapat membantu

masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum.

Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya. Perekonomian masyarakat Desa Tamansari perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

- Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan;
- Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa;
- Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat;
- Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam pembangunan masyarakat berperan dalam program swakelola pembangunan desa. Tujuan yang ingin dicapai dari perekonomian masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Pemerintah desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. Kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Setidaknya hal serupapun dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Tamansari, yang memang diharapkan mampu meningkatkan segala bentuk perekonomian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa upaya yang memang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari dalam meningkatkan kualitas dan perekonomian masyarakat sebagai berikut:

- Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital dan penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala nasional;

- Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu. Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD dan Perpustakaan Desa Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cekap dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal;
- Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Tidak hanya itu, dari segi perekonomian ekonomi pun Pemerintah Desa Tamansari mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KWT ini salah satunya adalah pemanfaatan lahan taman yaitu membuat taman yang menghasilkan dengan menanam kebutuhan dapur seperti cabai, tomat, terong.

KESIMPULAN

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan perekonomian masyarakat Desa Tamansari sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tamansari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setelah adanya dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan.

Setelah melaksanakan penelitian di Desa Tamansari, maka penulis memiliki beberapa saran. Perekonomian masyarakat alangkah lebih baiknya tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada di masyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan, agar masyarakat mampu berkembang. Contohnya pembuatan kelompok-kelompok Ekonomi kreatif, pengadaan mekanisme pasar desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang mandiri. Transparansi dana kepada masyarakat dirasa perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas jumlah serta program yang dilakukan, selain itu juga dengan adanya transparansi diharapkan mampu meningkatkan

kepercayaan terhadap Pemerintah Desa sendiri, juga meningkatkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan terlaksananya perekonomian masyarakat serta baiknya masyarakat mampu menggali lebih dalam lagi potensi apa yang ada di masyarakat, sehingga kedepannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Lexy J Moleong (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Emzir (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018. *Metode penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Miftahuddin (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Oos M. Anwas (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Widagdo, Ari Kuncara (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19 (2).